



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1921, 2015

KEMHAN. Indikator. Kinerja Utama. TNI. Kemhan.  
Penetapan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Kementerian Pertahanan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan TNI tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan Perundang-Undangan, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
2. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
3. Program adalah instrumen kebijakan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau yang setara di

lingkungan Kemhan dan TNI berisi I (satu) atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dari APBN.

4. Kegiatan adalah bagian dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II atau yang setara di lingkungan Kemhan dan TNI yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

#### Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk:
  - a. menetapkan rencana kinerja jangka menengah;
  - b. menetapkan rencana kinerja tahunan;
  - c. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - d. menyusun perjanjian kinerja;
  - e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - f. melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pertahanan negara.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Pejabat eselon II atau yang setingkat selaku penanggung jawab kegiatan wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab program.

## Pasal 4

- (1) Pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab program wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Unit Organisasi

## Pasal 5

- (1) Kepala Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI perlu melibatkan Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI.
- (2) Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
  - a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Kepala Unit Organisasi masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh kegiatan monitoring, evaluasi dan laporan akuntabilitas



kinerja yang sedang berlangsung dan belum selesai tetap menggunakan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 859).

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 859), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2015

MENTERI PERTAHANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 27 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN  
 DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Kementerian : Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan.
  - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan.
  - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan
  - d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
1.	Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam pertahanan negara	Persentase potensi sumber daya nasional yang dapat diberdayakan menjadi kekuatan pertahanan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi sumber daya nasional yang dapat diberdayakan menjadi kekuatan pertahanan negara)/(Jumlah potensi sumber daya nasional) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan U.O. Kemhan</li> </ul>	Potensi Pertahanan
2.	Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi	Persentase penanganan ancaman yang ditangani oleh Kemhan dan TNI dengan lembaga atau badan yang berkompeten secara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah penanganan ancaman yang ditangani oleh Kemhan dan TNI dengan lembaga atau badan yang berkompeten secara terintegrasi)/(Jumlah ancaman yang ditangani oleh Kemhan dan TNI) x 100%</li> </ul>	Strategi Pertahanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
		terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan U.O. Kemhan</li> </ul>	
3	Terwujudnya kerja sama pertahanan dengan negara sahabat	Persentase kerja sama bidang pertahanan yang telah diimplementasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah kerja sama bidang pertahanan yang telah diimplementasikan)/(Jumlah kerja sama pertahanan) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan U.O. Mabes TNI, U.O. TNI AD, U.O. TNI AL, dan U.O. TNI AU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionalisme Prajurit Intergratif</li> <li>• Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat</li> <li>• Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut</li> <li>• Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara</li> </ul>
4.	Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia diberbagai kawasan sebagai wujud dalam menjaga perdamaian dunia	Persentase pengiriman pasukan perdamaian dunia dihadapkan kebutuhan sesuai permintaan PBB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pengiriman pasukan perdamaian dunia)/(Jumlah pengiriman pasukan perdamaian dunia dihadapkan kebutuhan sesuai permintaan PBB ) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan U.O. Mabes TNI</li> </ul>	Penggunaan Kekuatan Pertahanan Intergratif
5.	Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional dan global	Persentase pemenuhan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Capaian kekuatan pokok minimum TNI)/(Kekuatan pokok minimum TNI yang direncanakan) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan U.O. Kemhan, U.O. Mabes TNI, U.O. TNI AD, U.O. TNI AL dan U.O. TNI AU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemhan</li> <li>• Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Intergratif</li> <li>• Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Sarpras Matra Darat</li> <li>• Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut</li> <li>• Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista, Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara</li> </ul>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
6.	Terwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayah yurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan Negara	Persentase penyelesaian masalah perbatasan darat, laut dan udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: (Jumlah penyelesaian masalah perbatasan darat, laut dan udara)/(Jumlah masalah perbatasan) x 100%</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan U.O. TNI AD, U.O. TNI AL dan U.O. TNI AU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Kesiapan Matra Darat</li> <li>Dukungan Kesiapan Matra Laut</li> <li>Dukungan Kesiapan Matra Udara</li> </ul>
7.	Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan alat peralatan pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang perekonomian nasional	Persentase peningkatan pemenuhan Alutsista oleh industri pertahanan dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: (Jumlah pemenuhan Alutsista oleh industri pertahanan dalam negeri tahun ini - Jumlah pemenuhan Alutsista oleh industri pertahanan dalam negeri tahun lalu)/(Jumlah pemenuhan Alutsista oleh industri pertahanan dalam negeri tahun lalu) x 100%</li> <li>Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan U.O. Kemhan</li> </ul>	Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan
		Persentase peningkatan pemenuhan Alpalhan oleh industri pertahanan dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: (Jumlah pemenuhan Alpalhan melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri tahun ini - Jumlah pemenuhan Alpalhan oleh industri pertahanan dalam negeri tahun lalu)/(Jumlah pemenuhan Alpalhan oleh industri pertahanan dalam negeri tahun lalu) x 100%</li> <li>Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan U.O. Kemhan</li> </ul>	

1. Nama Organisasi : Inspektorat Jenderal
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan.
3. Fungsi :
  - a. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
  - b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
  - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertahanan.
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian.
  - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

## 4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
-	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemhan	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan	Opini BPK terhadap laporan keuangan Kemhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Opini BPK terhadap laporan keuangan Kemhan</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Itjen</li> </ul>	Inspektorat Jenderal

## 5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
1.	Pengawasan Umum	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang kelembagaan, SDM, dan peraturan perundang-undangan	Persentase penurunan temuan bidang pengawasan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: (Jumlah temuan bidang wasum tahun lalu - Jumlah temuan bidang wasum tahun ini)/(Jumlah temuan bidang wasum tahun lalu) x 100%</li> <li>Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Inspektorat Umum</li> </ul>	Inspektorat Umum

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
2.	Pengawasan Pengadaan	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang pengadaan	Persentase penurunan temuan bidang pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah temuan bidang pengadaan tahun lalu - Jumlah temuan bidang pengadaan tahun ini) / (Jumlah temuan bidang pengadaan tahun lalu) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Inspektorat Pengadaan</li> </ul>	Inspektorat Pengadaan
3.	Pengawasan Keuangan	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang keuangan	Persentase penurunan temuan bidang keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah temuan bidang keuangan tahun lalu - Jumlah temuan bidang keuangan tahun ini) / (Jumlah temuan bidang keuangan tahun lalu) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Inspektorat Keuangan</li> </ul>	Inspektorat Keuangan
4.	Pengawasan Logistik	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang logistik	Persentase penurunan temuan bidang logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah temuan bidang logistik tahun lalu - Jumlah temuan bidang logistik tahun ini) / (Jumlah temuan bidang logistik tahun lalu) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Inspektorat Logistik</li> </ul>	Inspektorat Logistik

1. Nama Organisasi : Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
3. Fungsi :
  - a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertahanan.
  - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertahanan.
  - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertahanan.
  - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat.
  - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
  - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
-	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya U.O. Kemhan	Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan U.O. Kemhan	Persentase Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan U.O. Kemhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan U.O. Kemhan) / (Jumlah Satker) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.</li> <li>• Sumber data: Laporan Setjen</li> </ul>	Sekretaris Jenderal

## 5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
1.	Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan Negara	Meningkatnya satuan kerja menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman, dan terintegrasi dalam sistem informasi Hanneg	Persentase Satker Kemhan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman, dan terintegrasi dalam sistem informasi Hanneg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah Satker Kemhan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman, dan terintegrasi dalam sistem informasi Hanneg)/(Jumlah Satker Kemhan) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Pusdatin</li> </ul>	Pusat Data dan Informasi
2.	Pelayanan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan	Meningkatnya pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan keuangan pertahanan yang berdasarkan data yang terkini, terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan sesuai dengan SAI, dan SAKPA yang di selesaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah laporan keuangan sesuai dengan SAI, dan SAKPA yang di selesaikan tepat waktu</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Pusku</li> </ul>	Pusat Keuangan
3.	Pelayanan Bantuan Hukum	Meningkatnya pelayanan bantuan hukum yang akuntabel	Persentase perkara hukum yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah perkara hukum yang diselesaikan)/(Jumlah perkara hukum) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Biro Hukum</li> </ul>	Biro Hukum
4.	Pelayanan Rehabilitasi dan Perumahasakitan	Meningkatnya penyandang disabilitas Kemhan dan TNI memperoleh pelayanan rehabilitasi hingga mandiri serta jenis layanan perumahasakitan sesuai standar	Persentase penyandang disabilitas Kemhan dan TNI yang memperoleh rehabilitasi hingga mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah penyandang disabilitas Kemhan dan TNI yang memperoleh rehabilitasi hingga mandiri)/(Jumlah penyandang disabilitas Kemhan dan TNI) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Pusrehab</li> </ul>	Pusat Rehabilitasi

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
5.	Dukungan Pelayanan Umum U.O. Kemhan	Tercapainya standar pelayanan prima dalam bidang pengamanan, kerumahahtanganan, dan poliklinik, perbekalan, dan fasilitas bangunan	Persentase pelayanan bidang pengamanan, kerumahahtanganan, dan poliklinik, perbekalan, dan fasilitas bangunan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu, dan tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pelayanan bidang pengamanan, kerumahahtanganan, dan poliklinik, perbekalan dan fasilitas bangunan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu, dan sasaran)/(Jumlah pelayanan bidang pengamanan, kerumahahtanganan dan poliklinik, perbekalan, dan fasilitas bangunan) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Biro Umum</li> </ul>	Biro Umum.
6.	Dukungan Peningkatan Sarpras Aparatur U.O. Kemhan	Terperuhnya sarana, dan prasarana U.O. Kemhan sesuai kebutuhan, dan standar mutu	Jumlah Sarpras, dan bangunan yang direnovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah Sarpras, dan bangunan yang direnovasi</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Biro Umum</li> </ul>	
7.	Dukungan Pembinaan dan Pengelolaan Pegawai U.O. Kemhan	Terperuhnya Satuan kerja U.O. Kemhan memiliki pegawai sesuai kualifikasi kompetensi, dan kebutuhan dengan kesejahteraan terjamin	Persentase personel yang kompeten dibidangnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah personel yang kompeten dibidangnya)/(Jumlah personel) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Biro Kepegawaian</li> </ul>	Biro Kepegawaian
8.	Dukungan Perencanaan dan Penganggaran Program Kerja U.O. Kemhan	Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program kerja dan anggaran program kerja dan anggaran U.O. Kemhan jangka pendek dan menengah yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah yang diselesaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah yang diselesaikan tepat waktu)/(Jumlah dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Biro Perencanaan</li> </ul>	Biro Perencanaan

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
9.	Dukungan Administrasi Pelayanan Pimpinan U.O. Kemhan	Terselenggaranya pelayanan tugas pimpinan dan tata usaha kementerian yang sinergis, akuntabel, dan tepat waktu	Persentase dukungan administrasi dan pelayanan tugas pimpinan yang diselesaikan tepat waktu, dan sesuai SOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah dukungan administrasi dan pelayanan tugas pimpinan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai SOP)/(Jumlah dukungan administrasi dan pelayanan tugas pimpinan) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Biro Tata Usaha</li> </ul>	Biro Tata Usaha
10.	Pelayanan Komunikasi Publik	Meningkatnya citra positif Kemhan/TNI di masyarakat, dan forum internasional	Persentase berita dan informasi tentang pertahanan negara yang dipublikasikan dan direpson secara faktual, akurat, dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah berita dan informasi tentang pertahanan negara yang dipublikasikan dan direpson secara faktual, akurat dan tepat waktu)/(Jumlah berita dan informasi tentang pertahanan negara) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Puskom Publik</li> </ul>	Pusat Komunikasi Publik

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan di bidang strategi pertahanan negara.
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara meliputi perumusan kebijakan strategis, pengerahan komponen pertahanan, analisa lingkungan strategis, kerja sama internasional, wilayah pertahanan dan hukum strategi pertahanan
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.
  - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
-	Strategi Pertahanan	Terwujudnya kebijakan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, dan global	Jumlah kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditjen Strahan</li> </ul>	Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
1.	Analisa Strategis	Tersusunnya prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global secara tepat waktu dengan data yang terkini dan akurat	Jumlah produk kajian prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah produk kajian prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditanstra</li> </ul>	Direktorat Analisa Strategis

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
2.	Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif	Tersusunnya kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor	Jumlah dokumen kebijakan strategis yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah dokumen kebijakan strategis yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditjakstra</li> </ul>	Direktorat Kebijakan Strategis
3.	Kerja Sama Internasional	Terwujudnya keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional	Jumlah kerja sama bidang pertahanan dengan negara sahabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kerja sama bidang pertahanan dengan Negara sahabat</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditkersin</li> </ul>	Direktorat Kerjasama Internasional
4.	Perumusan Kebijakan Pengerahan Komponen Hanneg	Tersusunnya rumusan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional, maupun global	Jumlah rumusan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negaran dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional, maupun global	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah rumusan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negaran dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional, maupun global</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditrah</li> </ul>	Direktorat Pengerahan
5.	Perumusan Hukum Strategi Pertahanan	Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang pertahanan negara	Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah draft peraturan perundangan bidang pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditkumstrahan</li> </ul>	Direktorat Hukum Strategi Pertahanan
6.	Pengelolaan Wilayah Pertahanan	Terwujudnya wilayah pertahanan yang memiliki batas yang jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yang terintegrasi, akuntabel, dan terkini	Jumlah penanganan batas wilayah darat, laut, dan udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah penanganan batas wilayah darat, laut, dan udara</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditwilhan</li> </ul>	Direktorat Wilayah Pertahanan

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan, dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan Kementerian di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.
  - b. Pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara meliputi perencanaan pembangunan pertahanan, perencanaan program dan anggaran, administrasi pelaksanaan anggaran, pengendalian program dan anggaran.
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.
  - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.

## 4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
-	Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu, dan mampu memenuhi kebutuhan	Persentase perencanaan dan penganggaran pertahanan negara yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah perencanaan dan penganggaran pertahanan negara yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu)/(jumlah perencanaan dan penganggaran pertahanan negara) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditjen Renhan</li> </ul>	Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan

## 5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
1.	Administrasi dan Pelaksanaan Anggaran	Tersusunnya administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu	Persentase penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran yang terintegrasi dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran yang terintegrasi dan tepat waktu)/(Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditminlakgar</li> </ul>	Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran



No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
			Persentase penyelesaian administrasi pengadaan Alutsista melalui fasilitas pinjaman dalam negeri dan luar negeri yang tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah penyelesaian administrasi pengadaan Alutsista melalui fasilitas pinjaman dalam negeri dan luar negeri yang tepat waktu)/(Jumlah penyelesaian administrasi pengadaan Alutsista) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditminlakgar</li> </ul>	
2.	Pengendalian dan Program Anggaran	Tersusunnya pemetaan faktor keberhasilan dan ketidakeberhasilan unit organisasi dalam pelaksanaan program dan anggaran	Jumlah Unit Organisasi yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan program dan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah Unit Organisasi yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan program dan anggaran</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditdalprogar</li> </ul>	Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran
3.	Perencanaan Pembangunan Pertahanan	Tersusunnya perencanaan pembangunan pertahanan jangka sedang dan jangka pendek yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang diselesaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang diselesaikan tepat waktu)/(Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditrcnbanghan</li> </ul>	Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan
4.	Perencanaan Program dan Anggaran	Tersusunnya hasil perencanaan program dan anggaran tahunan U.O. Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu	Persentase dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DIPA yang diselesaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran dan DIPA yang diselesaikan tepat waktu)/(Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran dan DIPA) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditrenprogar</li> </ul>	Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan Kementerian di bidang potensi pertahanan nirmiliter.
  - b. Pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang potensi pertahanan meliputi kesadaran bela negara, komponen cadangan, komponen pendukung, pembinaan teknologi dan industri pertahanan serta pembinaan veteran.
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang potensi pertahanan nirmiliter.
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi pertahanan nirmiliter.
  - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
-	Potensi Pertahanan	Seluruh masyarakat, sumber daya alam/buatan dan sarana/prasarana nasional berdayaguna secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara	Persentase kebijakan pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana nasional yang mendukung pertahanan nirmiliter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah kebijakan pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana nasional yang mendukung pertahanan nirmiliter)/(Jumlah kebijakan pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana nasional) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Laporan Ditjen Potan</li> </ul>	Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
1.	Pembinaan Keveteranan	Terwujudnya komunikasi sosial, pelayanan serta pendataan dan dokumentasi keveteranan RI yang akuntabel dan tepat waktu	Persentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu)/(Jumlah Veteran) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditveteran</li> </ul>	Direktorat Veteran

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
2.	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Terwujudnya penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat	Jumlah wilayah yang melaksanakan pembentukan kader bela negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah wilayah yang melaksanakan pembentukan kader bela negara</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditbelneg</li> </ul>	Direktorat Bela Negara
3.	Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan	Terbentuknya komponen cadangan sesuai postur pertahanan	Jumlah kebijakan pembentukan dan pembinaan komponen cadangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan pembentukan dan pembinaan komponen cadangan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditkomcad</li> </ul>	Direktorat Komponen Cadangan
4.	Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung	Tertata dan terbinanya komponen pendukung secara terintegrasi	Jumlah kebijakan penataan dan pembinaan komponen pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan penataan dan pembinaan komponen pendukung</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditkomduk</li> </ul>	Direktorat Komponen Pendukung
5.	Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan	Tersedianya kebijakan untuk meningkatkan kemandirian lndhan sesuai dengan kemajuan Iptek	Jumlah kebijakan pengembangan industri pertahanan sesuai kemajuan Iptek yang dikembangkan secara mandiri meliputi program Bangtekindhan, ofset, dan bahan peledak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan pengembangan industri pertahanan sesuai kemajuan Iptek yang dikembangkan secara mandiri meliputi program Bangtekindhan, ofset, dan bahan peledak</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dittekindhan</li> </ul>	Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan.
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan Kementerian di bidang kekuatan pertahanan militer.
  - b. Pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang kekuatan pertahanan militer meliputi pembinaan sumber daya manusia, materiil, fasilitas, dan jasa serta kesehatan pertahanan militer.
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekuatan pertahanan militer.
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekuatan pertahanan militer.
  - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan.

## 4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
-	Kekuatan Pertahanan	Terwujudnya kekuatan pertahanan negara yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu	Jumlah kebijakan dibidang kekuatan pertahanan yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan dibidang kekuatan pertahanan yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditjen Kuathan</li> </ul>	Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan

## 5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
1.	Pembinaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan	Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang fasilitas dan jasa	Jumlah kebijakan pertahanan negara dibidang fasilitas dan jasa dengan pemetaan yang terkini dan akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidang fasilitas dan jasa dengan pemetaan yang terkini dan akurat</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditfasjas</li> </ul>	Direktorat Fasilitas dan Jasa

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
2.	Pembinaan Kesehatan Pertahanan	Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangannya sistem pertahanan negara di bidang kesehatan	Jumlah kebijakan pertahanan negara dibidang kesehatan dengan pemetaan yang terkini dan akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidang kesehatan dengan pemetaan yang terkini dan akurat</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditkes</li> </ul>	Direktorat Kesehatan
3.	Pembinaan Materil Pertahanan	Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangannya sistem pertahanan negara di bidang materil	Jumlah kebijakan di bidang materil pertahanan dengan pemetaan yang terkini dan akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan di bidang materil pertahanan dengan pemetaan yang terkini dan akurat</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditmat</li> </ul>	Direktorat Materil
4.	Pembinaan Personel Pertahanan	Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangannya sistem pertahanan negara di bidang SDM	Jumlah kebijakan di bidang SDM kekuatan komponen utama di petakan yang terkini dan akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan bidang SDM kekuatan komponen utama di petakan yang terkini dan akurat</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dit SDM</li> </ul>	Direktorat Sumber Daya Manusia

1. Nama Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan.
2. Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pertahanan.
3. Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan.
  - b. Pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan meliputi strategi, sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan alat peralatan pertahanan.
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan.
  - d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
-	Penelitian dan Pengembangan Kemhan	Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri	Persentase penerapan hasil produk Litbang sesuai kemajuan iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah penerapan hasil produk Litbang sesuai kemajuan iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri)/(Jumlah produk Litbang) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Balitbang</li> </ul>	Badan Penelitian dan Pengembangan

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
1.	Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan	Tersusunnya pemetaan terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, dan global	Jumlah rekomendasi potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, dan global	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah rekomendasi potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, dan global</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Puslitbang Strahan</li> </ul>	Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
2.	Penelitian dan Pengembangan Alpalhan	Terwujudnya Model dan/atau prototipe alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri	Jumlah model dan /atau prototipe alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah model dan/atau prototipe alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Puslitbang Alpalhan</li> </ul>	Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan
3.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pertahanan	Terwujudnya inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan Iptek serta mampu dijadikan prototipe	Jumlah rekomendasi inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan Iptek serta mampu dijadikan prototipe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah rekomendasi inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan Iptek serta mampu dijadikan prototipe</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Puslitbang Iptekhan</li> </ul>	Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan
4.	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan	Tersusunnya pemetaan sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kemajuan IPTEK	Jumlah rekomendasi sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kemajuan Iptek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah rekomendasi sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kemajuan Iptek</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Puslitbang Sumdahan</li> </ul>	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan

1. Nama Organisasi : Badan Pendidikan dan Pelatihan.
2. Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
3. Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan.
  - b. Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan meliputi manajemen pertahanan, bahasa, dan teknis fungsional pertahanan.
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan.
  - d. Pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan.
4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
-	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemhan	Tersedianya lulusan pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI yang memenuhi standar mutu	Persentase peningkatan hasil didik yang profesional memenuhi standar mutu dengan menerapkan kemajuan Iptek, dan mampu menjawab tantangan tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah hasil didik yang profesional memenuhi standar mutu dengan menerapkan kemajuan Iptek dan mampu menjawab tantangan tugas tahun ini - Jumlah hasil didik yang profesional memenuhi standar mutu dengan menerapkan kemajuan Iptek dan mampu menjawab tantangan tugas tahun lalu)/(Jumlah hasil didik yang profesional memenuhi standar mutu dengan menerapkan kemajuan Iptek dan mampu menjawab tantangan tugas tahun lalu) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Badiklat</li> </ul>	Badan Pendidikan dan Pelatihan

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
1.	Pendidikan dan Pelatihan Bahasa	Tersedianya lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa	Persentase peningkatan kompetensi lulusan Diklat bahasa yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah lulusan Diklat bahasa yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan tahun ini - Jumlah lulusan Diklat bahasa yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan tahun lalu) / (Jumlah lulusan Diklat bahasa yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan tahun lalu) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Pusdiklat Bahasa</li> </ul>	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa
2.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan	Tersedianya lulusan yang mampu menjawab tantangan tugas di bidang manajemen pertahanan	Persentase peningkatan kompetensi lulusan Diklatjemen yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah lulusan Diklatjemen yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan tahun ini - Jumlah lulusan Diklatjemen yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan tahun lalu) / (Jumlah lulusan Diklatjemen yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan tahun lalu) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Pusdiklat Jemen</li> </ul>	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan
3.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan	Tersedianya lulusan yang mampu menjawab tantangan tugas di bidang fungsional pertahanan	Persentase peningkatan kompetensi lulusan Teklfunghan yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah lulusan Teklfunghan yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan tahun ini - Jumlah lulusan Teklfunghan yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan tahun lalu) / (Jumlah lulusan Teklfunghan yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan tahun lalu) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Pusdiklat Teklfunghan</li> </ul>	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
4.	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan	Tersedianya lulusan pendidikan tinggi bidang pertahanan sesuai standar internasional	Persentase peningkatan kompetensi lulusan Unhan sesuai standar internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah lulusan Unhan sesuai standar internasional tahun ini - Jumlah lulusan Unhan sesuai standar internasional tahun lalu) / (Jumlah lulusan Unhan sesuai standar internasional tahun lalu) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Unhan</li> </ul>	Universitas Pertahanan

1. Nama Organisasi : Badan Sarana Pertahanan.
  2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.
  3. Fungsi :
    - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengelolaan sarana pertahanan.
    - b. Pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sarana pertahanan meliputi pengadaan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, sertifikasi kelaikan, kodifikasi materiil dan pengelolaan aset/barang milik negara di bidang pertahanan.
    - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sarana pertahanan.
    - d. Pelaksanaan administrasi Badan Sarana Pertahanan.
4. Indikator Kinerja Utama Eselon I dan II.

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I/II
A.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemhan	Terwujudnya sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri	Persentase sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri) / (Jumlah sarana dan prasarana pertahanan) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Baranahan</li> </ul>	Badan Sarana Pertahanan
1.	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara Kemhan/TNI yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu	Persentase pengelolaan aset milik negara yang akurat, terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pengelolaan aset milik negara yang akurat, terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu)/(Jumlah pengelolaan aset milik negara) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Pusat BMN</li> </ul>	Pusat Barang Milik Negara
2.	Kelaikan Sarana Pertahanan	Tersedianya sarana prasarana pertahanan yang memenuhi standar mutu	Jumlah kelaikan Alutsista dan komoditi militer lainnya serta kualifikasi penyelenggara kelaikan militer yang memenuhi standar mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kelaikan Alutsista dan komoditi militer lainnya serta kualifikasi penyelenggara kelaikan militer yang memenuhi standar mutu</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Pusat Laik</li> </ul>	Pusat Kelaikan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I/II
3.	Kodifikasi Materiil Pertahanan	Tersusunnya jumlah kode NSN yang terintegrasi secara nasional dan internasional dengan dokumentasi yang akuntabel	Jumlah kodifikasi materiil pertahanan yang terintegrasi secara nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kodifikasi materiil pertahanan yang terintegrasi secara nasional</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Puskod</li> </ul>	Pusat Kodifikasi
4.	Pengadaan Jasa Konstruksi Pertahanan	Terwujudnya Pembangunan konstruksi kekuatan pertahanan yang terintegrasi, tepat waktu, dan akuntabel	Jumlah pembangunan konstruksi pertahanan yang dibangun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pembangunan konstruksi pertahanan yang dibangun</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Puskon</li> </ul>	Pusat Konstruksi
5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	Jumlah sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan yang dibangun</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Puskon</li> </ul>	
6.	Pengadaan Barang dan Jasa Militer	Terwujudnya alutsista dan peralatan pendukung alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan	Jumlah pengadaan alutsista dan peralatan pendukung alutsista serta alat kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan alutsista dan peralatan pendukung alutsista serta alat kesehatan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Pusada</li> </ul>	Pusat Pengadaan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I/II
D.	Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	Meningkatnya Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap	Persentase Alutsista produksi dalam negeri yang tepat waktu dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah Alutsista produksi dalam negeri yang tepat waktu dan akuntabel) / (Jumlah Alutsista produksi dalam negeri) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Baranahan</li> </ul>	Badan Sarana Pertahanan
-	Produksi Alutsista Industri Dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Indhan	Meningkatnya kemandirian Alutsista produksi dalam negeri dan pengembangan Pinak Industri Pertahanan	Jumlah pengadaan Alutsista produksi dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan Alutsista produksi dalam negeri</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Pusada</li> </ul>	Pusat Pengadaan

1. Nama Organisasi : Badan Instalansi Strategis Nasional.
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional.
3. Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengelolaan kawasan instalansi strategis nasional.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan kawasan instalansi strategis nasional
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kawasan instalansi strategis nasional.
  - d. Pelaksanaan administrasi Badan Instalansi Strategis Nasional.
4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
-	Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	Terwujudnya pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan dan kerja sama kawasan instalasi strategis nasional di Sentul dalam mendukung tertib administrasi, tertib kegiatan dan tata kelola kawasan	Persentase pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional di Sentul yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional di Sentul yang terintegrasi)/(Jumlah pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional di Sentul) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Bainstranas Kemhan</li> </ul>	Badan Instalansi Strategis Nasional

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
1.	Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan	Terwujudnya pengamanan dan pemeliharaan kawasan instalasi strategis nasional di Sentul	Persentase pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional di Sentul yang aman dan terpelihara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional di Sentul yang aman dan terpelihara)/(Jumlah pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional di Sentul) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Puspamhar</li> </ul>	Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Kawasan

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon II
2.	Pembinaan Pengembangan dan Kerja Sama	Terwujudnya pengembangan dan kerja sama kawasan instalasi strategis nasional di Sentul	Persentase pengembangan dan kerja sama antar instansi di Sentul yang memenuhi standar sesuai tuntutan tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pengembangan dan kerja sama antar instansi di Sentul yang memenuhi standar sesuai tuntutan tugas)/(Jumlah pengembangan dan kerja sama antar instansi di Sentul) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Pusat Bangkerma</li> </ul>	Pusat Pengembangan dan Kerjasama

1. Nama Unit Organisasi : Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
2. Tugas : Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
3. Fungsi :
  - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
  - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
  - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

## 4. Indikator Kinerja Utama Eselon I dan II.

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
A.	Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	Terjaganya kedaulatan NKRI dengan melaksanakan pertahanan integratif melalui kegiatan deteksi dini, cegah dini, identifikasi, penangkalan, penindakan ancaman secara terintegrasi, efektif dan tepat waktu	Persentase penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu deteksi dini, cegah dini mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi sesuai prosedur tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi sesuai prosedur tetap)/(Jumlah penggunaan kekuatan pertahanan integratif) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sintel, Sops, Sren, Slog, Spers, Ster, dan Skomlek TNI</li> </ul>	U.O. Mabes TNI
1.	Operasi Militer Untuk Perang (OMP)	Terwujudnya tugas OMP secara efektif	Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMP</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Staf Umum TNI</li> </ul>	Staf Umum TNI



No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
2.	Operasi Militer Selain Perang (OMSP)	Terwujudnyatugas OMSP secara efektif	Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMSP</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.</li> <li>• Sumber data: Laporan Staf Umum TNI.</li> </ul>	Staf Umum TNI
3.	Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi	Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan	Jumlah Satker yang melaksanakan ops Gaktib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah Satker yang melaksanakan ops Gaktib</li> <li>• Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sintel, Spers, dan POM TNI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Personel</li> <li>• Staf Intelijen</li> <li>• Polisi Militer TNI</li> </ul>
4.	Operasi Intelijen Strategis	Dapat ditangkalnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pertahanan negara	Persentase produk intelijen yang dapat digunakan dalam rangka menangkal ATHG Hanneg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah produk intelijen yang dapat digunakan dalam rangka menangkal ATHG Hanneg)/(Jumlah produk intelijen) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sintel TNI</li> </ul>	Staf Intelijen
5.	Operasi SAR TNI	Terlaksananya pencarian dan penyelamatan kecelakaan bencana secara tepat waktu	Persentase operasi pencarian dan penyelamatan kecelakaan bencana sesuai Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah operasi pencarian dan penyelamatan kecelakaan bencana sesuai Peraturan Pemerintah)/(Jumlah operasi pencarian dan penyelamatan kecelakaan bencana) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sops TNI</li> </ul>	Staf Operasi
6.	Operasi Bantuan TNI	Terlaksananya operasi bantuan perkuatan TNI kepada Polri, Pemda, dan operasi bantuan penanggulangan bencana	Jumlah satuan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah satuanpasukan reaksi cepat penanggulangan bencana (PRCPB)</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sops TNI</li> </ul>	Staf Operasi
7.	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan	Terlaksananya operasi pemberdayaan wilayah pertahanan	Persentase Kotama Ops yang melaksanakan operasi pemberdayaan Wilhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah Kotama Ops yang melaksanakan operasi pemberdayaan Wilhan) / Jumlah Kotama Ops x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ster TNI</li> </ul>	Staf Teritorial

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
8.	Pemeliharaan Alut Integratif	Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatif Alut Integratif	Persentase senjata, munisi, dan kendaraan taktis/ kendaraan tempur yang siap operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah senjata, munisi, dan Rantis/Ranpur yang siap operasional)/(Jumlah senjata, munisi, dan Rantis/Ranpur) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog TNI</li> </ul>	Staf Logistik
9.	Pemeliharaan Non-Alut Integratif	Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatif Non Alut Integratif	Jumlah Randis/Ransus, Alkomlek, Alpalsus, Alkes, Alkomputer, mesin stationer, dan alsintor yang dipelihara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah Randis/Ransus, Alkomlek, Alpalsus, Alkes, Alkomputer, mesin stationer dan alsintor yang dipelihara</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog, Skomlek, dan Puskes TNI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Logistik.</li> <li>• Staf Komunikasi dan Elektronika</li> <li>• Pusat Kesehatan</li> </ul>
B.	Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif	Terwujudnya modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri	Persentase Alutsista/non Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah Alutsista/non Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri)/(Jumlah Alutsista/non Alutsista/Sarpras pertahanan) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog TNI</li> </ul>	U.O. Mabes TNI
1.	Pengadaan Rantis, Suced Ranpur dan Suced Rantis	Meningkatnya kemampuan dan jumlah Rantis serta ketersediaan Suced Ranpur/Rantis	Jumlah pengadaan Rantis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan Rantis</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog TNI</li> </ul>	Staf Logistik
2.	Pengadaan Non Alutsista/Senjata	Meningkatnya kemampuan dan jumlah peralatan materil non Alutsista	Jumlah pengadaan materil non Alutsista	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan materil non Alutsista</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog TNI</li> </ul>	Staf Logistik

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
3.	Pengadaan MKK	Terperuhnya kebutuhan munisi latihan dan bekal pokok MKK	Jumlah pengadaan MKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan MKK</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog TNI</li> </ul>	Staf Logistik
4.	Pengadaan Munisi Khusus	Terperuhnya kebutuhan munisi latihan dan bekal pokok munisi khusus	Jumlah pengadaan munisi khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan munisi khusus</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog TNI</li> </ul>	Staf Logistik
5.	Pengadaan Materil Khusus	Meningkatnya kemampuan dan jumlah materil khusus	Jumlah pengadaan materil khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan materil khusus</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog TNI</li> </ul>	Staf Logistik
6.	Pengadaan MKB	Terperuhnya kebutuhan munisi latihan dan bekal pokok MKB	Jumlah pengadaan MKB Non Dagri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan MKB Non Dagri</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog TNI</li> </ul>	Staf Logistik
7.	Pengadaan Senjata	Terperuhnya kebutuhan senjata sesuai TOP/DSPP	Jumlah pengadaan senjata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan senjata</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog TNI</li> </ul>	Staf Logistik
8.	Pengadaan Non Alut	Terperuhnya Alpalsus dan Alkomlek sesuai kebutuhan	Jumlah pengadaan Alpalsus dan Alkomlek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan Alpalsus dan Alkomlek</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog TNI dan Skomlek TNI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Logistik</li> <li>• Skomlek TNI</li> </ul>

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
9.	Pembangunan Sarpras Pendukung	Terperuhnya Sarpras pendukung sesuai kebutuhan	Jumlah renovasi dan pembangunan fasilitas pendukung operasi, fasilitas lembaga pendidikan, sarpras, dan fasilitas pendukung lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah renovasi dan pembangunan fasilitas pendukung operasi, fasilitas lembaga pendidikan, sarpras, dan fasilitas pendukung lainnya</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog TNI</li> </ul>	Staf Logistik
10.	Pengadaan Alutsista Strategis Integratif	Meningkatnya kemampuan Alutsista integratif	Jumlah pengadaan Alutsista integratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan Alutsista integratif</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog TNI</li> </ul>	Staf Logistik
C.	Profesionalisme Prajurit Integratif	Meningkatnya profesionalisme prajurit dalam rangka penggunaan kekuatan dan kemampuan satuan	Persentase prajurit yang profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah prajurit yang profesional)/(Jumlah prajurit x 100%)</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Spers dan Sops TNI</li> </ul>	U.O. Mabes TNI
1.	Pendidikan Pertama dan Penerimaan (Werving) TNI/PNS	Terperuhnya lulusan Pendidikan Pertama sesuai kebutuhan	Jumlah pendidikan pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pendidikan pertama</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Spers TNI</li> </ul>	Staf Personel
2.	Pendidikan Pengembangan/Spesialisasi	Terperuhnya lulusan pendidikan pengembangan/spesialisasi sesuai kebutuhan	Jumlah pendidikan spesialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pendidikan spesialisasi</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Spers TNI</li> </ul>	Staf Personel
3.	Latihan Kesiapsiagaan Operasi/Latgab/Latma Internasional	Meningkatnya kesiapsiagaan unsur TNI dalam operasi/Latgab/Latma Internasional	Jumlah latihan gabungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah latihan gabungan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sops TNI</li> </ul>	Staf Operasi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
4.	Latihan Pembinaan Balakpus TNI	Meningkatnya kemampuan dukungan Balakpus TNI	Jumlah latihan pembinaan Balakpus TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah latihan pembinaan Balakpus TNI</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sops TNI</li> </ul>	Staf Operasi
5.	Latihan Pratugas Operasi.	Meningkatnya dan menguji kemampuan unsur-unsur TNI yang akan melaksanakan tugas operasi	Jumlah satuan yang melaksanakan latihan pratugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah satuan yang melaksanakan latihan pratugas</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sops TNI</li> </ul>	Staf Operasi
6.	Pembangunan Sarpras Profesionalisme Personel Integratif	Terpenuhinya sarpras latihan integratif	Jumlah pembangunan Sarpras Integratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pembangunan Sarpras Integratif</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Spers dan Slog TNI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Logistik</li> <li>• Staf Personel</li> </ul>
D.	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan Mabes TNI	Persentase Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan Mabes TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan Mabes TNI/(Jumlah Satker di lingkungan Mabes TNI) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Itjen TNI</li> </ul>	U.O. Mabes TNI
1.	Penyelenggaraan Administrasi dan Perawatan Personel Integratif	Meningkatnya dukungan administrasi dan perawatan personel di lingkungan Mabes TNI	Persentase pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu dan tepat jumlah di lingkungan Mabes TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu dan tepat jumlah di lingkungan Mabes TNI/(Jumlah pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS di lingkungan Mabes TNI) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Spers TNI</li> </ul>	Staf Personel

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
2.	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	Meningkatnya dukungan operasional perkantoran	Jumlah kegiatan operasional perkantoran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Staf Umum TNI</li> </ul>	Staf Umum TNI
3.	Penyelenggaraan Pemeliharaan/ Perawatan Perkantoran Integratif	Meningkatnya dukungan Pemeliharaan/ Perawatan Perkantoran Integratif	Jumlah gedung perkantoran yang dipelihara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah gedung perkantoran yang terpelihara</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slog TNI</li> </ul>	Staf Logistik
4.	Perawatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mabes TNI	Jumlah sarana prasarana Satker yang dipelihara di lingkungan Mabes TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah sarana prasarana yang terpelihara di lingkungan Mabes TNI</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Staf Umum TNI</li> </ul>	Staf Logistik
5.	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Integratif	Meningkatnya sistem dan evaluasi kinerja integratif	Jumlah produk sistem dan evaluasi kinerja, administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan yang disusun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah produk sistem dan evaluasi kinerja, administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan yang disusun</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Srenum dan Itjen TNI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Kebijakan Strategi dan Kebijakan Umum</li> <li>• Inspektorat Jenderal</li> </ul>

- 1 Nama Unit Organisasi : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
- 2 Tugas :
- Melaksanakan tugas TNI Matra Darat di bidang pertahanan
  - Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain
  - Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan Matra Darat
  - Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat
- 3 Fungsi :
- Menyelenggarakan Fungsi Utama Pertempuran dan Pembinaan Teritorial.
  - Menyelenggarakan Fungsi Organik yang meliputi: Intelijen, Operasi, Sumber Daya Manusia, Logistik, Teritorial, Perencanaan, Pengawasan dan Pemeriksaan serta Penyiapan Kekuatan Matra Darat.
  - Menyelenggarakan Fungsi Teknis Umum yang meliputi: Infanteri, Kavaleri, Artileri Medan, Artileri Pertahanan Udara, Penerbangan, Zeni, Perhubungan, Peralatan, Pembekalan Angkutan, Kesehatan, Polisi Militer, Ajudan Jenderal, Topografi, Hukum, dan Keuangan.
  - Menyelenggarakan Fungsi Teknis Militer Khusus, meliputi: operasi khusus yang bernilai strategis maupun taktis dan bersifat terpilih guna mendukung pertempuran di darat, di laut, dan di udara yang dilakukan Pasukan Khusus (Kopassus) serta operasi khusus yang bernilai strategis maupun taktis dengan melaksanakan operasi lintas udara dan *raid* guna mendukung pertempuran darat yang dilakukan Pasukan Linud dan Pasukan Raider.
  - Menyelenggarakan Fungsi Teknis Khusus, yang meliputi: Jasmani Militer, Pembinaan Mental, Psikologi, Penelitian dan Pengembangan, Sejarah, Sistem Informasi, Penerangan, Pengendalian Personel, Kelaikan, serta Pelayanan Pengadaan.

## 4 Indikator Kinerja Utama Eselon I dan II

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Penanggung Jawab
A.	Dukungan Kesiapan Matra Darat	Terwujudnya kemampuan dan kekuatan TNI AD yang siap operasional dalam menghadapi setiap ancaman	Persentase satuan yang siap melaksanakan operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: (Jumlah satuan yang siap melaksanakan operasional) / (Jumlah satuan) x 100%</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Sops dan Slogad</li> </ul>	U.O. TNI AD

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Penanggung Jawab
1.	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat	Meningkatnya kemampuan dan tersedianya produk intelijen Matra Darat	Jumlah kegiatan intelijen Matra Darat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan intelijen Matra Darat</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Spamad dan Pusintelad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Staf Pengamanan</li> <li>Pusat Intelijen</li> </ul>
2.	Kerja sama Internasional Matra Darat	Meningkatnya kerja sama internasional Matra Darat	Jumlah kerja sama dengan negara sahabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Jumlah kerja sama dengan negara sahabat</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Sopsad</li> </ul>	Staf Operasi
3.	Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan	Meningkatnya survei dan pemetaan	Jumlah peta yang direvisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Jumlah peta yang direvisi</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Dittopad</li> </ul>	Direktorat Topografi
4.	Pemeliharaan/ Perawatan Ranpur	Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatif kendaraan tempur	Jumlah kendaraan tempur yang dipelihara, dirawat, dan diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Jumlah Jumlah kendaraan tempur yang dipelihara, dirawat, dan diperbaiki</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Ditpalad</li> </ul>	Direktorat Peralatan
5.	Pemeliharaan/ Perawatan Pesawat Terbang	Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatif pesawat terbang	Jumlah pesawat terbang yang di pelihara, dirawat, dan diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Jumlah Jumlah pesawat terbang yang di pelihara, dirawat, dan diperbaiki</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Puspenerbad</li> </ul>	Pusat Penerbangan
6.	Pemeliharaan/ Perawatan Alat Angkut Air	Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatif alat angkut air	Jumlah alat angkut air yang dipelihara, dirawat, dan diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Jumlah alat angkut air yang dipelihara, dirawat, dan diperbaiki</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Ditbekangad</li> </ul>	Direktorat Pembekalan Angkutan

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Penanggung Jawab
7.	Pemeliharaan/ Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal	Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatif Senjata dan Munisi/Alpal	Jumlah Senjata dan Munisi/Alpal yang dipelihara, dirawat dan diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah Senjata dan Munisi/Alpal yang dipelihara, dirawat dan diperbaiki</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditpalad</li> </ul>	Direktorat Peralatan
8.	Pemeliharaan/ Perawatan Non Alutsista	Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatif Non Alutsista	Jumlah kendaraan bermotor, mesin stasioner, alat zeni, alat perhubungan, alat kesehatan, alat topografi, alat laboratorium, alat cetak, alat satri, fasilitas latihan/ prasarana latihan, perlengkapan satuan lapangan, alat musik, alat mesin kantor yang dipelihara dirawat dan diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kendaraan bermotor, mesin stasioner, alat zeni, alat perhubungan, alat kesehatan, alat topografi, alat laboratorium, alat cetak, alat satri, fasilitas latihan/ prasarana latihan, perlengkapan satuan lapangan, alat musik, alat mesin kantor yang dipelihara dirawat dan diperbaiki</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditpalad, Ditziad, Dithubad, Ditkesad, Dittopad, Ditbekangad, Dislitbangad, Disinfoahad, Ditajenad, dan Dispenad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Peralatan</li> <li>• Direktorat Zeni</li> <li>• Direktorat Perhubungan</li> <li>• Direktorat Kesehatan</li> <li>• Direktorat Topografi</li> <li>• Direktorat Pembekalan Angkatan</li> <li>• Dinas Penelitian dan Pengembangan</li> <li>• Dinas Informasi dan Pengolahan Data</li> <li>• Direktorat Ajudan Jenderal</li> <li>• Dinas Penerangan</li> </ul>
9.	Penyelenggaraan Kegiatan Teritorial Matra Darat	Terwujudnya ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh serta kemandirian TNI dan rakyat	Jumlah produk teritorial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah produk teritorial</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sterad dan Pusterad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Teritorial</li> <li>• Pusat Teritorial</li> </ul>

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Penanggung Jawab
10.	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat	Meningkatnya sistem dan metodologi evaluasi kinerja Matra Darat	Jumlah sistem informasi yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah sistem informasi yang dibangun</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Srenad dan Disinfoahad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Perencana</li> <li>• Dinas Informasi dan Pengolahan Data</li> </ul>
11.	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Darat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Litbanghan Matra Darat	Jumlah kegiatan Litbanghan TNI AD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan Litbanghan TNI AD</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Srenad dan Dislitbangad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Perencana</li> <li>• Dinas Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>
12.	Pemeliharaan dan Perawatan Ksatrian dan Fasilitas Latihan Tempur	Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatif Ksatrian dan Fasilitas Latihan Tempur	Jumlah Ksatrian, sarana dan prasarana latihan yang dipelihara, dirawat, dan diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah Ksatrian, sarana dan prasarana latihan yang dipelihara, dirawat, dan diperbaiki</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slogad dan Ditziad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Logistik</li> <li>• Direktorat Zeni</li> </ul>
13.	Penyelenggaraan Pembinaan Potensi Nasional Menjadi Kekuatan Pertahanan	Terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran bela negara	Jumlah kegiatan pembinaan perlawanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan bakti TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan pembinaan perlawanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial, dan pembinaan bakti TNI</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sterad dan Pusterad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Teritorial</li> <li>• Pusat Teritorial</li> </ul>
14.	Penyelenggaraan OMSP	Meningkatnya kemampuan operasi militer selain perang Matra Darat	Jumlah kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sopsad dan Sterad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Operasi</li> <li>• Staf Teritorial</li> </ul>

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Penanggung Jawab
B.	Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	Terwujudnya Alutsista, Non Alutsista dan Sarpras TNI AD yang memenuhi kebutuhan, standar mutu sesuai kemajuan IPTEK serta dapat dikembangkan secara mandiri	Persentase Alutsista, Non Alutsista dan Sarpras TNI AD yang memenuhi kebutuhan, standar mutu sesuai kemajuan IPTEK serta dapat dikembangkan secara mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: (Jumlah Alutsista, Non Alutsista dan Sarpras TNI AD yang memenuhi kebutuhan, standar mutu sesuai kemajuan IPTEK serta dapat dikembangkan secara mandiri) / (Jumlah Alutsista, Non Alutsista dan Sarpras TNI AD) x 100%</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Slogad</li> </ul>	U.O. TNI AD
1.	Pengadaan/ Penggantian Kendaraan Tempur	Meningkatnya kesiapan dan penambahan jumlah kendaraan tempur	Jumlah pengadaan kendaraan tempur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan kendaraan tempur</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Slogad dan Ditpalad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Staf Logistik</li> <li>Direktorat Peralatan</li> </ul>
2.	Pengadaan/ Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)	Meningkatnya kesiapan dan penambahan jumlah Pesawat Terbang (Sabang)	Jumlah pengadaan pesawat terbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan pesawat terbang</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Slogad dan Puspenerbad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Staf Logistik</li> <li>Pusat Penerbang</li> </ul>
3.	Pengadaan/ Penggantian Alat Angkut Air	Meningkatnya kesiapan dan penambahan jumlah alat angkut air	Jumlah pengadaan/ penggantian alat angkut air	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan/ penggantian alat angkut air</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Slogad dan Ditbekangad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Staf Logistik</li> <li>Direktorat Pembekalan Angkutan</li> </ul>
4.	Pengadaan/ Penggantian Senjata dan Munisi	Meningkatnya kesiapan dan penambahan jumlah senjata dan munisi	Jumlah pengadaan senjata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan senjata</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Slogad dan Ditpalad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Staf Logistik</li> <li>Direktorat Peralatan</li> </ul>
5.	Pengadaan/ Penggantian Materil Alutsista	Meningkatnya kesiapan dan penambahan jumlah materil Alutsista	Jumlah pengadaan kendaraan taktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan kendaraan taktis</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Slogad, Ditpalad, Dithubad, Ditziad, Ditbekangad, Dittopad,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Staf Logistik</li> <li>Direktorat Peralatan</li> <li>Direktorat Perhubungan</li> <li>Direktorat Zeni</li> </ul>

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Penanggung Jawab
				dan Pusintelad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Pembekalan Angkutan</li> <li>Direktorat Topografi</li> <li>Pusat Intelijen</li> </ul>
6.	Pengadaan/ Penggantian Materil Non Alutsista	Meningkatnya kesiapan dan penambahan jumlah materil non Alutsista	Jumlah pengadaan materil non alutsista meliputi: materil khusus Intel, alat zen, alat perhubungan, alat peralatan, alat perbekalaan angkutan, alat kesehatan, alat topografi, alat khusus penerangan, alat penelitian dan pengembangan, alat sistem informasi, dan alat psikologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan Materil non alutsista meliputi: Materil khusus Intel, alat zen, alat perhubungan, alat peralatan, alat perbekalaan angkutan, alat kesehatan, alat topografi, alat khusus penerangan, alat penelitian dan pengembangan, alat sistem informasi, dan alat psikologi</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Slogad, Ditpalad, Dithubad, Ditziad, Ditbekangad, Dittopad, Disinfolaha, Dispenad, Ditkesad, dan Dislitbangad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Kesehatan</li> <li>Staf Logistik</li> <li>Direktorat Peralatan</li> <li>Direktorat Perhubungan</li> <li>Direktorat Zeni</li> <li>Direktorat Pembekalan Angkutan</li> <li>Dinas Informasi dan Pengolahan Data</li> <li>Dinas Penelitian dan Pengembangan</li> <li>Dinas Penerangan</li> <li>Direktorat Kesehatan</li> </ul>
7.	Pengembangan Fasilitas Sarpras Matra Darat	Tersedianya fasilitas sarana prasarana Matra Darat dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI AD	Jumlah pos perbatasan dan Sarpras yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi penghitungan: Jumlah pos perbatasan dan sarpras yang dibangun</li> <li>Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>Sumber data: Laporan Slogad dan Ditziad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Staf Logistik</li> <li>Direktorat Zeni</li> </ul>

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Penanggung Jawab
8.	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat	Meningkatnya kesiapan dan penambahan jumlah Alutsista Strategis Matra Darat	Jumlah pengadaan alutsista strategis Matra Darat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan alutsista strategis Matra Darat</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slogad, Ditpalad, Dithubad, Ditziad, Ditbekangad, dan Puspenerbad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Logistik</li> <li>• Direktorat Peralatan</li> <li>• Direktorat Perhubungan</li> <li>• Direktorat Zeni</li> <li>• Direktorat Pembekalan Angkutan</li> <li>• Pusat Penerbang</li> </ul>
C.	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	Meningkatnya kemampuan profesionalisme personel Matra Darat	Persentase kualitas personel sesuai kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah kualitas personel sesuai kompetensi)/(Jumlah personel) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sopsad dan Spersad</li> </ul>	U.O. TNI AD
1.	Latihan Matra Darat	Meningkatnya kesiapan operasi Matra Darat	Jumlah latihan dan penataran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah latihan dan penataran</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sopsad dan Kodiklat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Operasi</li> <li>• Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan</li> </ul>
2.	Latihan Bersama Internasional	Meningkatnya kerja sama militer dengan negara sahabat	Jumlah latihan bersama dengan negara sahabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah latihan bersama dengan negara sahabat</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sopsad</li> </ul>	Staf Operasi
3.	Pendidikan Pertama Matra Darat	Tersedianya lulusan pendidikan pertama Matra Darat sesuai standar	Jumlah pendidikan pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pendidikan pertama</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Kodiklat</li> </ul>	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Penanggung Jawab
4.	Pendidikan Pembentukan Matra Darat	Tersedianya lulusan pendidikan pembentukan Matra Darat sesuai standar	Jumlah pendidikan pembentukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pendidikan pembentukan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Kodiklat</li> </ul>	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan
5.	Pendidikan Pengembangan Umum/Rutin Matra Darat	Tersedianya lulusan pendidikan pengembangan umum Matra Darat sesuai standar	Jumlah pendidikan pengembangan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pendidikan pengembangan umum</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Kodiklat</li> </ul>	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan
6.	Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat	Tersedianya lulusan pendidikan pengembangan spesialisasi Matra Darat sesuai standar	Jumlah pendidikan pengembangan spesialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pendidikan pengembangan spesialisasi</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Kodiklat</li> </ul>	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan
7.	Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat	Tersedianya lulusan profesi dan keahlian Matra Darat sesuai standar	Jumlah pendidikan profesi dan keahlian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pendidikan profesi dan keahlian</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Kodiklat</li> </ul>	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan
8.	Pembangunan Sarpras Profesionalisme Personel Matra Darat	Tercukupinya Sarpras profesionalisme personel Matra Darat	Jumlah pembangunan Sarpras pendidikan dan latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pembangunan Sarpras pendidikan dan latihan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Spersad, Slogad, dan Ditziad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Personel</li> <li>• Staf Logistik</li> <li>• Direktorat Zeni</li> </ul>
D.	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI AD	Persentase Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI AD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI AD)/(Jumlah Satker TNI AD) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sopsad</li> </ul>	U.O. TNI AD

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Penanggung Jawab
1.	Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat	Meningkatnya dukungan perawatan personel Matra Darat	Persentase pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu dan tepat jumlah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu dan tepat jumlah)/(Jumlah Prajurit dan PNS) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Spersad</li> </ul>	Staf Personel
2.	Penggiatan Fungsi Matra Darat	Meningkatnya dukungan penggiatan fungsi Matra Darat	Persentase administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu)/(Jumlah administrasi perkantoran) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan seluruh Satker</li> </ul>	Seluruh Satker
3.	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Darat	Meningkatnya penyelesaian hukum dan disiplin personel TNI AD	Persentase pelanggaran hukum dan disiplin personel TNI AD yang diselesaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pelanggaran hukum dan disiplin personel TNI AD yang diselesaikan tepat waktu)/(Jumlah pelanggaran hukum dan disiplin) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Puspomad</li> </ul>	Pusat Polisi Militer
4.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum	Meningkatnya pembinaan dan bantuan hukum bagi personel TNI AD	Persentase perkara yang mendapatkan bantuan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah perkara yang mendapatkan bantuan hukum)/(Jumlah perkara) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ditkumad</li> </ul>	Direktorat Hukum
5.	Penyelenggaraan Administrasi Personel	Meningkatnya dukungan administrasi personel Matra Darat	Persentase PNS yang menerima uang makan dan penambahan daya tahan tubuh PNS yang tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah PNS yang menerima uang makan dan penambahan daya tahan tubuh PNS yang tepat waktu)/(Jumlah PNS) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan seluruh Satker</li> </ul>	Seluruh Satker

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Penanggung Jawab
6.	Pemeliharaan/ Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras Perkantoran	Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatif peralatan fungsional, fasilitas dan Sarpras perkantoran	Jumlah bangunan gedung dan rumah dinas yang dipelihara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah bangunan gedung dan rumah dinas yang dipelihara</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slogad dan Ditziad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Logistik</li> <li>• Direktorat Zeni</li> </ul>
7.	Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal	Meningkatnya dukungan administrasi perbekalan dan dukungan bekal Matra Darat	Persentase pengadaan Kaporlap sesuai dengan norma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pengadaan Kaporlap sesuai dengan norma)/(Jumlah pengadaan Kaporlap) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slogad dan Ditbekang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Logistik</li> <li>• Direktorat Pembekalan Angkatan</li> </ul>
8.	Penyelenggaraan Penpas dan Penum	Meningkatnya dukungan penerangan pasukan dan penerangan umum	Jumlah produk penerangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah produk penerangan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dispenad</li> </ul>	Dinas Penerangan
9.	Penyelenggaraan Administrasi Umum	Meningkatnya dukungan administrasi umum Matra Darat	Jumlah dukungan administrasi umum meliputi ; kegiatan pendidikan dan latihan fungsional, pembinaan mental, rapat koordinasi/kerja/dinas/ pimpinan/keompok kerja/konsultasi, pembinaan olah raga dan kesenian, kegiatan anggaran rutin, dan dukungan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah dukungan administrasi umum meliputi ; kegiatan pendidikan dan latihan fungsional, pembinaan mental, rapat koordinasi/ kerja/dinas/ pimpinan/keompok kerja/konsultasi, pembinaan olah raga dan kesenian, kegiatan anggaran rutin dan dukungan pelayanan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan seluruh Satker</li> </ul>	Seluruh Satker
10.	Penyelenggaraan Administrasi Pembinaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan	Meningkatnya dukungan administrasi meliputi: doktrin dan organisasi	Jumlah doktrin dan organisasi yang disusun/ revisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah doktrin dan organisasi yang disusun/revisi</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Srenad</li> </ul>	• Staf Perencanaan



No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
11.	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	Meningkatnya kinerja dan tertib administrasi perbendaharaan Satker Matra Darat	Jumlah Satker yang menjadi obyek pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah Satker yang menjadi obyek pemeriksaan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Ijenad</li> </ul>	Inspektorat Jenderal

1. Nama Unit Organisasi : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
2. Tugas :
  - a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.
  - b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
  - c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
  - e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
3. Fungsi :
  - a. Membantu di dalam penyusunan kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin dan strategi, serta operasi militer matra laut.
  - b. Membantu di dalam komponen pertahanan sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut.
  - c. Penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Panglima TNI.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I dan II.

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
A.	Dukungan Kesiapan Matra Laut	Terwujudnya kemampuan dan kekuatan TNI AL yang siap operasional dalam menghadapi setiap ancaman	Persentase satuan TNI AL yang siap melaksanakan operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah satuan TNI AL yang siap melaksanakan operasi)/(Jumlah satuan TNI AL) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sopsal</li> </ul>	U.O. TNI AL
1.	Penyelenggaraan Surta Hidros	Meningkatnya penyelenggaraan Surta Hidros Matra Laut	Jumlah data peta laut yang dibuat/revisi meliputi peta kertas, dan peta elektronik (Electronic Navigational Charts/ENC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah data peta laut yang dibuat/revisi meliputi peta kertas dan peta elektronik (Electronic Navigational Charts/ENC)</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dishidrosal</li> </ul>	Dinas Hidro-Oceanografi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
2.	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Laut	Meningkatnya sistem dan metodologi evaluasi kinerja TNI AL	Jumlah sistem aplikasi dan metode kinerja TNI AL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah sistem aplikasi dan metode kinerja TNI AL</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Disinfo/lahtaal</li> </ul>	Dinas Informasi dan Pengolahan Data
3.	Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materil dan Fasilitas Matra Laut	Meningkatnya kualitas dan kuantitas uji kelaikan TNI AL	Jumlah sertifikat uji kelaikan TNI AL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah sertifikat uji kelaikan TNI AL</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Kelaikan Materil</li> </ul>	Dinas Kelaikan Materil
4.	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek Matra Laut	Meningkatnya kesiapan sarpras komunikasi, persandian dan pernika komunikasi TNI AL	Jumlah peralatan komunikasi, persandian dan pernika komunikasi yang dibeli/dipelihara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah peralatan komunikasi, persandian dan pernika komunikasi yang dibeli/dipelihara</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika</li> </ul>	Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika
5.	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amunisi Matra Laut	Meningkatnya kesiapan peralatan senjata, elektronika, dan amunisi TNI AL	Jumlah peralatan senjata elektronika, dan amunisi yang dipelihara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah peralatan komunikasi, persandian, dan pernika komunikasi yang dibeli/dipelihara</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Materil Senjata dan Elektronika</li> </ul>	Dinas Materil Senjata dan Elektronika
6.	Pemeliharaan/Perawatan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis	Meningkatnya kesiapan KRI, KAL, Alpung, Ranpur, dan Rantis Matra Laut	Jumlah pemeliharaan dan perawatan KRI, KAL, Alpung Ranpur, dan Rantis Matra Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pemeliharaan dan perawatan KRI, KAL, Alpung Ranpur, dan Rantis Matra Laut</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Materil</li> </ul>	Dinas Materil

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
7.	Penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang Matra Laut dan Penegakan Hukum Serta Penjagaan Keamanan Di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional	Terwujudnya keamanan laut di perairan yurisdiksi nasional Indonesia	Persentase pelanggaran hukum di laut yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pelanggaran hukum di laut yang diselesaikan)/(Jumlah pelanggaran hukum di laut) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sopsal</li> </ul>	Staf Operasi
8.	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Laut	Meningkatnyakualitas dan kuantitas Litbang TNI AL	Jumlah laporan kajian dan produk Litbang TNI AL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah laporan kajian dan produk Litbang TNI AL</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>	Dinas Penelitian dan Pengembangan
9.	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut	Tersedianya produk intelijen yang dapat mendukung tugas-tugas TNI AL	Jumlah kegiatan dan produk intelijen matra laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan dan produk intelijen matra laut</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Pengamanan</li> </ul>	Dinas Pengamanan
10.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut	Terwujudnya dukungan masyarakat dan industri jasa maritim untuk kepentingan pertahanan laut	Jumlah kegiatan pembinaan potensi maritim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan pembinaan potensi maritim</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Potensi Maritim</li> </ul>	Dinas Pembinaan Potensi Maritim
11.	Pemeliharaan/Perawatan Pesud	Terwujudnya kesiapan penerbangan TNI AL dalam mendukung tugas operasi	Jumlah layanan pemeliharaan perawatan pesawat udara TNI AL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah layanan pemeliharaan perawatan pesawat udara TNI AL</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Pusat Penerbangan</li> </ul>	Pusat Penerbangan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
B.	Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Sarpras Matra Laut	Terwujudnya Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras TNI AL yang memenuhi kebutuhan, standar mutu sesuai kemajuan IPTEK serta dapat dikembangkan secara mandiri	Persentase Alutsista, dan non Alutsista siap operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah Alutsista dan non Alutsista siap operasional)/(Jumlah Alutsista dan non Alutsista) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Materil</li> </ul>	U.O. TNI AL
1.	Peningkatan/ Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut	Peningkatan kesiapan, dan penambahan jumlah fasilitas serta sarana/prasarana pangkalan TNI AL	Jumlah dermaga yang di bangun, dan direhab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah dermaga yang di bangun dan direhab</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Fasilitas dan Pangkalan</li> </ul>	Dinas Fasilitas Pangkalan
2.	Peningkatan/ Pengadaan Peralatan Surta Hidros	Peningkatan kemampuan, dan penambahan jumlah peralatan Surta Hidros	Jumlah pengadaan alat survey Hidro Oseanografi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan alat survey hidro oseanografi</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Hidro-Oseanografi</li> </ul>	Dinas Hidrografi dan Oseanografi
3.	Peningkatan/ pengadaan peralatan Komlek Matra Laut	Peningkatan kesiapan, dan penambahan peralatan Sarpras Komlek TNI AL	Jumlah pengadaan alat komunikasi dan elektronika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan alat komunikasi dan elektronika</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika</li> </ul>	Dinas Komunikasi dan Elektronika
4.	Peningkatan/ pengadaan Senlek dan Amunisi Matra Laut	Peningkatan kemampuan, dan penambahan jumlah Senlek dan amunisi	Jumlah pengadaan senjata, dan amunisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan senjata dan amunisi</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Materil Senjata dan Elektronika.</li> </ul>	Dinas Materil Senjata dan Elektronika

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
5.	Peningkatan/ Pengadaan Alpung, KRI, KAL dan Ranpur/Rantis Matra Laut	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alpung, KRI, KAL, Ranpur, dan Rantis	Jumlah pengadaan Alpung, KRI, KAL, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan Alpung, KRI, KAL, kendaraan tempur dan kendaraan taktis</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Materil</li> </ul>	Dinas Materil
6.	Peningkatan/ Pengadaan Peralatan Passusla dan Materil Non Alutsista Matra Laut	Penambahan jumlah peralatan passusla dan materil non Alutsista Matra Laut	Jumlah pengadaan peralatan Pasukan khusus laut dan materil non Alutsista Matra Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan peralatan Pasukan khusus laut dan materil non Alutsista Matra Laut</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Pembekalan</li> </ul>	Dinas Pembekalan
7.	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut	Percepatan pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut	Jumlah pengadaan Alat utama sistem senjata Strategis Matra Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan Alat utama sistem senjata Strategis Matra Laut</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Pengadaan</li> </ul>	Dinas Pengadaan
8.	Peningkatan/ Pengadaan Pesud dan Sarpras Penerbangan Matra Laut	Peningkatan kemampuan dan penambahan Pesud beserta sarpras penerbangan TNI AL	Jumlah pengadaan suku cadang pesawat udara TNI AL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan suku cadang pesawat udara TNI AL</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Komandan Pusat Penerbangan</li> </ul>	Pusat Penerbangan
C.	Peningkatan Profesionalisme Personil Matra Laut	Kinerja organisasi semakin meningkat dan diawasi oleh personel yang berkualitas, sesuai SKP dan dengan jumlah yang mencukupi sesuai DSP	Persentase personel yang kompeten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah personel yang kompeten)/(Jumlah personel) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Spersal</li> </ul>	U.O. TNI AL

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
1.	Werving dan Seleksi	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan seleksi personel untuk mengikuti pendidikan sesuai kebutuhan/standar	Jumlah personel yang lulus seleksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah personel yang lulus seleksi</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Administrasi Personil</li> </ul>	Dinas Administrasi Personil
2.	Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Profesionalisme Pesonel Matra Laut	Tercukupinya fasilitas dan sarpras profesionalisme Matra Laut	Jumlah pembangunan fasilitas dan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pembangunan fasilitas dan sarana prasarana</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas fasilitas dan pangkalan</li> </ul>	Dinas fasilitas pangkalan
3.	Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut	Peningkatan kemampuan personel dan satuan TNI AL dalam melaksanakan tugas operasi TNI AL	Jumlah latihan operasi yang dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah latihan operasi yang dilaksanakan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Staf Operasi</li> </ul>	Staf Operasi
4.	Pendidikan Pertama, Pengembangan Umum, Spesialisasi, Profesi dan Keterampilan Serta Pendidikan Pembentukan Matra Laut	Terseleenggaranya pendidikan TNI AL pada semua strata dan sesuai standar	Jumlah pendidikan yang dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pendidikan yang dilaksanakan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Pendidikan</li> </ul>	Dinas Pendidikan
5.	Penyelenggaraan Psikologi Matra Laut	Meningkatnya kondisi psikologi personel dan satuan TNI AL sesuai standar serta kesiapan operasi psikologi TNI AL	Jumlah pelayanan psikologi Matra Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pelayanan psikologi matra laut</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Psikologi</li> </ul>	Dinas Psikologi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
D.	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	Terwujudnya manajemen dan operasional Matra Laut yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI AL	Persentase Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI AL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI AL) / (Jumlah Satker TNI AL) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Spersal dan Pusat Polisi Militer</li> </ul>	U.O. TNI AL
1.	Penyelenggaraan Administrasi Personel Matra Laut	Meningkatnya dukungan administrasi personel TNI AL	Persentase data personel yang memenuhi syarat sesuai dengan klasifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah data personel yang memenuhi syarat sesuai dengan klasifikasi) / (Jumlah personel) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Administrasi Personil</li> </ul>	Dinas Administrasi Personil
2.	Perawatan/Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas, dan Sarpras Pengelolaan LTGA	Meningkatnya dukungan perawatan peralatan fungsional, fasilitas, dan Sarpras pengelolaan LTGA	Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pemakaian LTGA) / (Jumlah pagu LTGA) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Fasilitas dan Pangkalan</li> </ul>	Dinas Fasilitas Pangkalan
3.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Matra Laut	Meningkatnya dukungan pelayanan kesehatan Matra Laut	Persentase personel beserta keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah personel beserta keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan) / (Jumlah personel beserta keluarga) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Kesehatan</li> </ul>	Dinas Kesehatan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
4.	Penyelenggaraan Pembinaan hukum Matra Laut	Meningkatnya Pembinaan hukum Matra Laut	Persentase perkara hukum yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah perkara hukum yang diselesaikan) / (Jumlah perkara hukum) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas pembinaan hukum</li> </ul>	Dinas Pembinaan Hukum
5.	Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan Matra Laut	Meningkatnya dukungan administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan TNI AL	Persentase pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAI, dan SAKPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pelaporan keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA)/(Jumlah pelaporan keuangan) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Keuangan</li> </ul>	Dinas Keuangan
6.	Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal Matra Laut	Meningkatnya dukungan administrasi perbekalan dan dukungan bekal Matra Laut	Persentase penyelesaian administrasi perbekalan sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah penyelesaian administrasi perbekalan sesuai ketentuan)/(Jumlah penyelesaian administrasi perbekalan) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Pembekalan</li> </ul>	Dinas Pembekalan
7.	Penyelenggaraan Penerangan Pasukan dan Penerangan Umum Matra Laut	Meningkatnya kesiapan dan kemampuan Penpas dan Penum TNI AL dalam rangka penyampaian informasi	Jumlah produk penerangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah produk penerangan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Penerangan</li> </ul>	Dinas Penerangan
8.	Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Matra Laut	Meningkatnya dukungan administrasi perawatan personel Matra Laut	Persentase personel yang mendapatkan perawatan sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah personel yang mendapatkan perawatan sesuai ketentuan)/(Jumlah personel) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dinas Perawatan Personel</li> </ul>	Dinas Perawatan Personel

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
9.	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Matra Laut	Meningkatnya kinerja dan tertib administrasi perbendaharaan TNI AL	Jumlah pembinaan pengawasan dan pemeriksaan rutin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pembinaan pengawasan dan pemeriksaan rutin</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Inspektorat Jenderal</li> </ul>	Inspektorat Jenderal
10.	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Laut	Meningkatnya penyelesaian hukum dan disiplin personel TNI AL	Jumlah kegiatan penegakan hukum, ketertiban, dan disiplin yang dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan penegakan hukum, ketertiban dan disiplin yang dilaksanakan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Pusat Polisi Militer</li> </ul>	Pusat Polisi Militer
11.	Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Laut	Meningkatnya dukungan administrasi umum TNI AL	Persentase penyelesaian administrasi umum yang sesuai dengan ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah penyelesaian administrasi umum yang sesuai dengan ketentuan)/(Jumlah penyelesaian administrasi umum) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sekretariat Umum</li> </ul>	Sekretariat Umum

1. Nama Unit Organisasi : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
2. Tugas :
  - a. Melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan.
  - b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
  - c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan Matra Udara.
  - d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.
3. Fungsi :
  - a. Pembinaan kekuatan organisasi, personel, materiil, fasilitas dan jasa, sistem dan metode, serta anggaran dalam rangka terlaksananya tugas TNI Angkatan Udara.
  - b. Pembinaan kemampuan untuk mewujudkan suatu kemampuan operasional berbasis profesionalitas yang dapat diandalkan guna mencapai keberhasilan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
  - c. Penggunaan kekuatan TNI AU sebagai penangkal, penindak, dan pemulih.

## 4. Indikator Kinerja Utama Eselon I dan II.

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
A.	Dukungan Kesiapan Matra Udara	Terwujudnya kemampuan dan kekuatan TNI AU yang siap melaksanakan operasi	Persentase satuan TNI AU yang siap melaksanakan operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah satuan TNI AU yang siap operasi)/(Jumlah satuan TNI AU) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Slogau</li> </ul>	U.O. TNI AU
1.	Penyelenggaraan OMSP Matra Udara	Meningkatnya kemampuan operasi militer selain perang di wilayah udara yurisdiksi nasional	Jumlah penyelenggaraan OMSP Matra Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi perhitungan: Jumlah penyelenggaraan OMSP Matra Udara</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Laporan Sopsau</li> </ul>	Staf Operasi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
2.	Pemeliharaan/ Perawatan Pesawat Udara, Senjata dan Alarmsus lainnya	Meningkatnya kesiapan dan kemampuan Alutsista TNI AU	Jumlah pesawat udara yang dipelihara dan diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pesawat udara yang dipelihara dan diperbaiki</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Disaeroau</li> </ul>	Dinas Aeronautika
3.	Penyelenggaraan Dukungan Operasi Penerbangan	Meningkatnya kesiapan Alpalsus dukungan operasi penerbangan Matra Udara	Jumlah alpalsus yang dipelihara, dirawat, dan diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah alpalsus yang dipelihara, dirawat, dan diperbaiki</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Diebangopeau</li> </ul>	Dinas Pengembangan Operasi
4.	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara	Meningkatnya sistem informasi matra udara	Jumlah sistem informasi manajemen yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah sistem informasi manajemen yang dibangun</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Disinfohtaau.</li> </ul>	Dinas Informasi dan Pengolahan Data
5.	Pemeliharaan/ Perawatan Radar, FSU, dan Alarmsus Komplek Lainnya	Meningkatnya kesiapan dan kemampuan radar, FSU, dan Alarmsus Komplek lainnya	Jumlah radar yang dipelihara, dirawat, dan diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah radar yang dipelihara, dirawat dan diperbaiki</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Diskomleka</li> </ul>	Dinas Komunikasi dan Elektronika
6.	Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Udara	Meningkatnya kualitas, dan kuantitas uji kelaikan Matra Udara	Jumlah penyelenggaraan uji kelaikan Matra Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah penyelenggaraan uji kelaikan matra udara</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dislambangiaau</li> </ul>	Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja
7.	Litbanghan Matra Udara	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Litbanghan Matra Udara	Jumlah produk Litbanghan Matra Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah produk Litbanghan Matra Udara</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dislitbangau</li> </ul>	Dinas Penelitian dan Pengembangan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
8.	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara	Meningkatnya kemampuan intelijen Matra Udara	Jumlah produk intelijen yang dihasilkan untuk kegiatan pengamanan Matra Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah produk intelijen yang dihasilkan untuk kegiatan pengamanan Matra Udara</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dispansanau</li> </ul>	Dinas Pengamanan dan Sandi
9.	Penyelenggaraan Wilayah Pertahanan Matra Udara	Meningkatnya potensi wilayah dalam rangka pertahanan Matra Udara	Jumlah kegiatan pembinaan potensi dirgantara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan pembinaan potensi dirgantara</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dispotdirgaa</li> </ul>	Dinas Potensi Kedirgantaraan
10.	Penyelenggaraan Surta	Meningkatnya kemampuan survei dan pemetaan Matra Udara	Jumlah pembuatan peta udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pembuatan peta udara</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dispotrudau</li> </ul>	Dinas Survey dan Pemetaan Udara
B.	Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	Terwujudnya Alutsista dan fasilitas, sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AU serta dapat dikembangkan secara mandiri	Persentase alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras Matra Udara yang siap operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras Matra Udara yang siap operasi)/(Jumlah alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras matra udara) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Disadaau, Disaeroau, Diskomlekau, Disaeroau, dan Dismataau</li> </ul>	U.O. TNI AU
1.	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara	Terpenuhnya Alutsista strategis Matra Udara	Jumlah pengadaan F-16 EDA dan C-130 eks RAAF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan F-16 EDA dan C-130 eks RAAF</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Disadaau</li> </ul>	Dinas Pengadaan
2.	Peningkatan/ Pengadaan Pesawat Udara dan Dukungan Lainnya	Meningkatnya kesiapan dan kemampuan pesawat udara	Jumlah pesawat yang siap operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pesawat yang siap operasional</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Disaeroau</li> </ul>	Dinas Aeronautika

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
3.	Peningkatan/ Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	Meningkatnya kesiapan Sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU	Jumlah Sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU yang dibangun</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dislaskonau</li> </ul>	Dinas Fasilitas dan Kontruksi
4.	Peningkatan/ Pengadaan Radar, FSU, dan Alat Komlek Lainnya	Meningkatnya kemampuan, dan jumlah radar dan alat komlek lainnya	Jumlah radar yang siap operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah radar yang siap operasi</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Diskomlekau</li> </ul>	Dinas Komunikasi dan Elektronika
5.	Peningkatan/ Pengadaan Senri/Senrat	Meningkatnya kemampuan, dan jumlah persenjataan	Jumlah pengadaan senjata ringan/senjata berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan senjata ringan/senjata berat</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Disaeroau</li> </ul>	Dinas Aeronautika
6.	Pengadaan Peralatan Non Alutsista	Meningkatnya kemampuan, dan jumlah non Alutsista	Jumlah pengadaan Ranmor dan peralatan pendukung penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan Ranmor dan peralatan pendukung penerbangan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dismataau</li> </ul>	Dinas Materil
C.	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	Terpenuhnya profesionalisme personel matra udara sesuai Daftar Susunan Personel (DSP)	Persentase personel yang sesuai dengan DSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah personel yang sesuai dengan DSP)/(Jumlah personel) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sopsau, Spersau, dan Disdikau</li> </ul>	U.O. TNI AU
1.	Latihan Matra Udara	Meningkatnya kesiapan operasi matra udara	Jumlah kegiatan latihan operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan latihan operasi</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.</li> <li>• Sumber data: Laporan Sopsau</li> </ul>	Staf Operasi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
2.	Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara	Meningkatnya kemampuan personel melalui berbagai jenjang pendidikan	Jumlah pendidikan yang dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah pendidikan yang dilaksanakan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Disdikau</li> </ul>	Dinas Pendidikan
3.	Pembangunan Sarpras Kesejahteraan Personel Matra Udara	Tercukupinya Sarpras kesejahteraan personel matra udara	Persentase prajurit yang menerima fasilitas perumahan/asrama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah prajurit yang menerima fasilitas perumahan/asrama)/(Jumlah prajurit) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Disfaskonau</li> </ul>	Dinas Fasilitas dan Kontruksi
4.	Werving	Tersedianya personel hasil seleksi sesuai standar	Jumlah personel yang lulus seleksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah personel yang lulus seleksi</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Disminpersau</li> </ul>	Dinas Administrasi Personel
5.	Penyelenggaraan Psikologi Matra Udara	Tersedianya personel TNI AU dengan kondisi psikologi sesuai standar	Persentase personel yang mendapatkan layanan psikologi matra udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah personel yang mendapatkan layanan psikologi matra udara)/(Jumlah personel) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dispsikologau</li> </ul>	Dinas Psikologi
D.	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI AU	Persentase Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI AU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI AU)/(Jumlah Satker TNI AU) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Puspomau</li> </ul>	U.O. TNI AU

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
1.	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara	Terwujudnya personel yang disiplin dan taat hukum	Persentase pelanggaran disiplin dan hukum personel TNI AU yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pelanggaran disiplin dan hukum personel TNI AU yang diselesaikan)/(Jumlah Jumlah pelanggaran disiplin dan hukum) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Puspomau</li> </ul>	Pusat Polisi Militer
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	Meningkatnya kinerja Satker di jajaran TNI AU	Jumlah Satker yang menjadi objek pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah Satker yang menjadi objek pemeriksaan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Irjenau</li> </ul>	Inspektorat Jenderal
3.	Pemeliharaan/ Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras Serta Pengelolaan LTGA	Optimalisasi penggunaan LTGA Matra Udara	Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pemakaian LTGA)/(Jumlah pagu LTGA) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Disfaskonau</li> </ul>	Dinas Fasilitas dan Kontruksi
4.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan personel TNI AU	Persentase personel TNI AU beserta keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan : (Jumlah personel TNI AU beserta keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan)/(Jumlah personel TNI AU ) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan : Non kumulatif</li> <li>• Sumber data : Laporan Diskesau</li> </ul>	Dinas Kesehatan
5.	Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan	Terwujudnya administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan matra udara yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu)/(Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Diskuau</li> </ul>	Dinas Keuangan



No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
6.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum	Meningkatnya pembinaan hukum TNI AU	Persentase perkara hukum yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah perkara hukum yang diselesaikan)/(Jumlah perkara hukum) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Diskumau</li> </ul>	Dinas Hukum
7.	Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan Umum dan Pemeliharaan dan Perawatan Perkantoran	Meningkatnya Administrasi Perbekalan dan dukungan bekal Matra Udara	Persentase penyelesaian administrasi perbekalan sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah penyelesaian administrasi perbekalan sesuai ketentuan)/(Jumlah penyelesaian administrasi perbekalan) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dismatau</li> </ul>	Dinas Materil
8.	Penyelenggaraan Administrasi Personel Matra Udara	Meningkatnya dukungan administrasi personel TNI AU	Persentase dokumen administrasi personel TNI AU yang diselesaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah dokumen administrasi personel TNI AU yang diselesaikan tepat waktu)/(Jumlah dokumen administrasi personel TNI AU) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dismipersau</li> </ul>	Dinas Administrasi Personel
9.	Penyelenggaraan Penerangan Pasukan dan Penerangan Umum Matra Udara	Meningkatnya dukungan Penpas dan Penum TNI AU	Jumlah produk penerangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: Jumlah produk penerangan</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Dispenau</li> </ul>	Dinas Penerangan
10.	Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara	Terpenuhinya hak-hak prajurit dan PNS TNI AU	Persentase pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI AU yang diterima tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI AU yang diterima tepat waktu)/(Jumlah hak-hak prajurit dan PNS TNI AU) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Diswatpersau</li> </ul>	Dinas Perawatan Personel

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab
11.	Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Udara	Meningkatnya dukungan administrasi umum TNI AU	Persentase penyelesaian administrasi umum TNI AU sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan: (Jumlah penyelesaian administrasi umum TNI AU sesuai ketentuan)/(Jumlah penyelesaian administrasi umum TNI AU) x 100%</li> <li>• Tipe penghitungan: Non kumulatif</li> <li>• Sumber data: Laporan Sekretariat Umum</li> </ul>	Sekretaris Umum

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU